

## DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi.....	iii-iv
Abstrak.....	v-ix
Dinamika Sistem Pemilu Masa Transisi di Indonesia <i>oleh: Indra Pahlevi</i> .....	111-135
Migrasi Manusia di Asia Pasifik dan Implikasinya <i>oleh: Poltak Partogi Nainggolan</i> .....	136-157
Urgensi Indonesia Menjadi Negara Pihak Statuta Roma bagi Perlindungan HAM di Indonesia <i>oleh: Marfuatul Latifah</i> .....	158-184
Ebola dan Ancaman Keamanan Non-Tradisional di ASEAN <i>oleh: Dewi Amelia Tresna Wijayanti</i> .....	185-199
Politik Desentralisasi Fiskal: Permasalahan dalam Implementasi <i>oleh: Juli Panglima Saragih</i> .....	200-224
Pedoman Penulisan	



## PENGANTAR REDAKSI

Kehadiran *Jurnal Politica*, edisi ini yaitu Volume 5, Nomor 2, November 2014 merupakan kesinambungan dari edisi-edisi sebelumnya. *Jurnal Politica* ini diterbitkan oleh Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI adalah wadah bagi tulisan-tulisan ilmiah hasil kajian dan penelitian tentang masalah-masalah strategis di bidang politik dalam negeri dan hubungan internasional. Jurnal ini merupakan sarana bagi para peneliti, akademisi, dan praktisi untuk menuangkan gagasan dan ide-ide sekaligus sumber inspirasi khususnya terkait dengan proses pengambilan kebijakan, termasuk dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pada edisi kali ini terdapat 5 (lima) tulisan yang mengupas beberapa persoalan terkait isu-isu strategis yakni tentang politik desentralisasi fiskal, dinamika sistem pemilu, lalu lintas manusia dan implikasinya di kawasan, ebola dan ancaman non tradisional di ASEAN, dan tentang perlindungan HAM di Indonesia.

Tulisan pertama disampaikan oleh Indra Pahlevi dengan judul “Dinamika Sistem Pemilu Masa Transisi di Indonesia”. Penulis menyajikan berbagai kondisi sejak era reformasi dalam proses pencarian sistem pemilu terbaik di Indonesia melalui serangkaian pembentukan undang-undang di bidang pemilu dalam 3 (tiga) periode yakni tahun 1999, 2003, dan 2008. Penulis memaparkan bahwa Indonesia mengalami masa transisi menuju era demokrasi melalui penyelenggaraan pemilu sejak tahun 1999. Dari 3 (tiga) pemilu awal yaitu 1999, 2004, dan 2009, kondisi Indonesia masih dalam masa transisi demokrasi menuju masa konsolidasi demokrasi. Beberapa fakta menunjukkan bahwa proses perumusan sistem pemilu yang hendak diterapkan masih belum menemui titik akhir, sehingga setiap pemilu selalu diawali dengan perdebatan sistem pemilu yang akan digunakan melalui perubahan Undang-Undang tentang Pemilu Legislatif yang menghasilkan UU No. 3 tahun 1999, UU No. 12 tahun 2003, dan UU No. 10 tahun 2008. Hasil pemilu belum menunjukkan tuntasnya perdebatan sistem pemilu yang layak digunakan karena masih menghasilkan banyak partai politik di parlemen yang mengakibatkan tidak efektifnya kinerja parlemen.

Tulisan kedua disampaikan oleh Poltak Partogi Nainggolan yang menulis dengan judul “Lalu Lintas Manusia dan Implikasinya di Kawasan”. Penulis menyatakan bahwa Perkembangan situasi global dewasa ini ditandai dengan meningkatnya secara drastis kegiatan lalu-lintas manusia, yang melibatkan para aktor non-negara secara masif, terutama di Asia Tenggara. Aktifitas manusia lintas-kawasan dalam berbagai bentuk, seperti masuknya imigran legal dan ilegal, penyelundupan manusia, tenaga kerja migran, mereka yang mengklaim sebagai pengungsi, kelompok radikal, dan lain-lain, telah membawa implikasi lebih jauh terhadap hubungan antar-negara dan stabilitas di kawasan.

Tulisan ketiga disampaikan oleh Marfuatul Latifah dengan judul tulisan “Urgensi Indonesia untuk Menjadi Negara Pihak dari Statuta Roma bagi Perlindungan HAM di Indonesia”. Penulis menyampaikan bahwa Statuta Roma merupakan perjanjian internasional yang di dalamnya mengatur mengenai penegakan hukum atas kejahatan HAM berat dalam dunia internasional. Indonesia mengikuti konferensi yang mengesahkan Statuta Roma pada tahun 1998 namun, sampai saat ini Indonesia belum menjadi negara pihak dari Statuta Roma. Salah satunya karena masih adanya kekhawatiran akan yurisdiksi Statuta Roma yang dianggap akan menghukum warga Negara Indonesia (WNI) pelaku pelanggaran HAM berat di masa lalu. Hasil kajian ini mengungkapkan bahwa kekhawatiran tersebut tidak benar karena Mahkamah Internasional menganut prinsip Non-Retroaktif dan Komplementer. Penerapan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional di Negara

pihak akan dilakukan dengan lebih mengutamakan hukum nasional sehingga hukum nasional khususnya terkait dengan pelanggaran HAM berat lebih efektif. Indonesia akan mendapatkan banyak manfaat dengan menjadi Negara Pihak dari Statuta Roma dan melakukan pengadopsian ketentuan yang terdapat dalam Statuta Roma kedalam hukum nasional di Indonesia.

Tulisan keempat disampaikan oleh Dewi Amelia Tresna Wijayanti yang menulis dengan judul “Ebola dan Ancaman Keamanan Non-Tradisional di ASEAN”. Penulis menyampaikan bahwa negara-negara di dunia saat ini menghadapi ancaman meluasnya penyebaran wabah Ebola. Tulisan Artikel ini membahas mengenai ancaman wabah Ebola sebagai bentuk ancaman keamanan non tradisional dan perlunya organisasi regional di kawasan Asia Tenggara untuk mempertimbangkan dan melakukan inovasi baru dalam bentuk kerjasama multilateral untuk menanggulangi ancaman tersebut. Hasil analisa deskriptif menunjukkan bahwa wabah Ebola, sebagai ancaman keamanan non tradisional, dapat menjadi katalis bagi terciptanya bentuk kerjasama antar negara ASEAN di bidang keamanan yang lebih formal dan terinstitusionalisasi.

Tulisan kelima atau terakhir ditulis oleh Juli Panglima Saragih dengan judul “Politik Desentralisasi Fiskal: Permasalahan Dalam Implementasi”. Tulisan ini mengupas tentang masih banyaknya persoalan dalam implementasi desentralisasi fiskal di Indonesia. Desentralisasi fiskal merupakan kebijakan fiskal yang bertujuan menyeimbangkan kapasitas fiskal antara pusat-daerah dan antar-fiskal daerah. Secara konsep, desentralisasi fiskal merupakan sebuah model yang tepat dari politik desentralisasi fiskal. Dalam tulisan tersebut, penulis berkesimpulan bahwa dalam pelaksanaan desentralisasi, masih terdapat permasalahan terkait masih lemahnya kapasitas fiskal daerah walau politik desentralisasi fiskal sudah dilaksanakan sejak otonomi daerah diberlakukan.

Demikianlah pengantar redaksi atas 5 (lima) tulisan yang tersaji dalam *Jurnal Politica* edisi kali ini. Redaksi berharap agar semua tulisan yang tersaji pada edisi kali ini dapat memberikan inspirasi, menjadi bahan informasi, serta menjadi alternatif solusi dalam proses pengambilan keputusan dan/ atau bagi pembaca secara keseluruhan yang tertarik dengan isu-isu dimaksud. Namun demikian, redaksi menyadari jika masih terdapat beberapa kekurangan yang mungkin tersaji dalam edisi kali ini. Untuk itu redaksi berharap agar pembaca memberikan masukan atas sajian jurnal ini pada umumnya dan tulisan-tulisan ini pada khususnya. Redaksi mengucapkan terima kasih kepada Dr. Lili Romli, M.Si., Dr. Ganewati Wuryandari, keduanya Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), serta kepada Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksun, M.Si, Guru Besar Ilmu Administrasi FISIP Universitas Indonesia sebagai mitra bestari atas koreksi dan masukannya terhadap semua tulisan dalam *Jurnal Politica* edisi kali ini.

Jakarta, November 2014

Redaksi

Kata Kunci bersumber dari artikel  
Lembar ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya

Indra Pahlevi

Dinamika Sistem Pemilu Masa Transisi di Indonesia

Indonesia mengalami masa transisi menuju era demokrasi melalui penyelenggaraan pemilu sejak tahun 1999. Dari 3 (tiga) pemilu awal yaitu 1999, 2004, dan 2009, kondisi Indonesia masih dalam masa transisi demokrasi menuju masa konsolidasi demokrasi. Beberapa fakta menunjukkan bahwa proses perumusan sistem pemilu yang hendak diterapkan masih belum menemui titik akhir, sehingga setiap pemilu selalu diawali dengan perdebatan sistem pemilu yang akan digunakan melalui perubahan Undang-Undang tentang Pemilu Legislatif yang menghasilkan UU No. 3 tahun 1999, UU No. 12 tahun 2003, dan UU No. 10 tahun 2008. Hasil pemilu belum menunjukkan tuntasnya perdebatan sistem pemilu yang layak digunakan karena masih menghasilkan banyak partai politik di parlemen yang mengakibatkan tidak efektifnya kinerja parlemen.

Kata Kunci: pemilu legislatif, transisi demokrasi, konsolidasi demokrasi, Indonesia, sistem pemilu

Indra Pahlevi

*The Dynamics of Election System During Transition in Indonesia*

*Indonesia is turning its phase from transition into democratization through general elections since 1999. After three legislative elections in 1999, 2004, and 2009, the country still shows its difficulties in realizing its democratic consolidation. Some facts disclose that the process to find right election has not yet finished in the country. That is why, as the election time comes, discussions on applying the right system still take place, with which Law No.3/1999, Law No. 12/2003, and Law No. 10/2008 have been respectively amended.*

*Keywords: legislative election, democratic transition, democratic consolidation, Indonesia, election system*

Kata Kunci bersumber dari artikel  
Lembar ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya

Poltak Partogi Nainggolan

Migrasi Manusia di Asia Pasifik dan Implikasinya

Perkembangan situasi global dewasa ini ditandai dengan meningkatnya migrasi manusia, yang melibatkan aktor non-negara secara masif, terutama di Asia Pasifik. Aktifitas manusia lintas-kawasan dalam berbagai bentuk, seperti masuknya imigran legal dan ilegal, aksi penyelundupan manusia, masuknya tenaga kerja migran, pengungsi, dan kelompok radikal, serta kasus-kasus penyelundupan manusia dan lain-lain telah membawa implikasi lebih jauh terhadap hubungan antar-negara dan stabilitas di kawasan tersebut. Tulisan ini adalah bagian dari laporan penelitian kualitatif yang menggunakan sumber-sumber tertulis dan wawancara mendalam. Analisisnya mengungkapkan aktifitas aktor non-negara yang semakin intens dengan implikasinya yang mengancam stabilitas negara dan hubungannya dengan negara lain.

Kata Kunci: migrasi, stabilitas kawasan, terorisme, pekerja migran, Asia Pasifik

Poltak Partogi Nainggolan

*People Migration in Asia-Pacific and Its Implications*

*Current global situation is marked by people migration involving large numbers non-state actors, particularly in Asia-Pacific. People's activities across regions in various forms, i.e. the flows of legal and illegal migrants, migrant workers, refugees, and radical groups, and cases of people smuggling etc, have brought about further implications to state-relations and stability in the region. This essay is part of a qualitative research report which uses writing sources and in-depth interviews. Its analysis reveals a more intensive activities of non-state actors which threat states stability and their relations each other.*

*Keywords: migration, regional stability, terrorism, migrant workers, Asia-Pacific*

Kata Kunci bersumber dari artikel  
Lembar ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya

Marfuatul Latifah

Urgensi Indonesia Menjadi Negara Pihak Statuta Roma bagi Perlindungan HAM di Indonesia

Statuta Roma merupakan perjanjian internasional yang mengatur penegakan hukum atas kejahatan HAM berat di dunia internasional. Walaupun Indonesia mengikuti konferensi yang mengesahkan Statuta Roma pada tahun 1998, namun sampai saat ini tidak menjadi negara pihak dari Statuta Roma. Salah satu alasan karena masih adanya kekhawatiran yurisdiksi Statuta Roma akan menghukum warga negara Indonesia (WNI) dalam pelanggaran HAM berat di masa lalu. Hasil kajian ini mengungkapkan bahwa kekhawatiran itu tidak benar, karena Mahkamah Internasional menganut prinsip non-retroaktif dan komplementer. Juga, penerapan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional di Negara Pihak akan dilakukan dengan lebih mengutamakan hukum nasional, terkait pelanggaran HAM berat, untuk bisa diterapkan lebih efektif. Indonesia sebenarnya akan mendapatkan banyak manfaat dengan menjadi Negara Pihak dari Statuta Roma dan melakukan pengadopsian ketentuan yang terdapat dalam Statuta Roma ke dalam hukum nasional di Indonesia.

Kata Kunci: negara pihak, statuta Roma, HAM, Indonesia, WNI, ICC

Marfuatul Latifah

*The Urgency of Indonesia Become State Party of The Rome Statute for The Protection of Human Rights In Indonesia*

*Rome Statute as an international agreement has the jurisdiction on the enforcement of the prosecutions of grave human rights violations. Although Indonesia attended the conference which endorsed the Rome Statute in 1998, in fact, the country has not yet ratified it. Indonesia worries that the Rome Statute gives chance to punish Indonesians in cases of past serious human rights violations. This study's finding, against, however, that worrisome due to the existence of the principle of the non-retroactivity and the complementary of the international criminal court. The implementation of the International Criminal Court will actually respect national law, especially which will make more effective the protection of human rights. As a Party State, Indonesia will obtain a lot of benefits in absorbing the provisions in the Rome Statute into national law.*

*Keyword: party state, Rome Statute, human rights, Indonesia, Indonesian citizen, ICC*

Kata Kunci bersumber dari artikel  
Lembar ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya

Dewi Amelia Tresna Wijayanti

*Ebola dan Ancaman Keamanan Non-Tradisional di ASEAN*

Masyarakat global saat ini menghadapi ancaman bahaya meluasnya wabah Ebola. Tulisan ini membahas ancaman wabah Ebola sebagai bentuk ancaman keamanan non tradisional dan perlunya organisasi regional di kawasan Asia Tenggara untuk mempertimbangkan dan melakukan gagasan baru dalam bentuk kerjasama multilateral untuk menanggulangi ancaman tersebut. Hasil analisa deskriptif ini menunjukkan bahwa wabah Ebola, sebagai ancaman keamanan non tradisional dapat menjadi katalis bagi terciptanya bentuk kerjasama antar negara ASEAN di bidang keamanan yang lebih formal dan terinstusionalisasi.

Kata Kunci: keamanan non-tradisional, wabah Ebola, kerjasama regional, ASEAN, ancaman keamanan

Dewi Amelia Tresna Wijayanti

*Ebola and Non-Traditional Threat in ASEAN*

*Global community currently faces the dangerous spread of Ebola endemic. This essay discusses the threat of Ebola outbreak as one of non-traditional security issues and the need for regional organizations to consider new concept in the multilateral cooperation to combat the threat. The results of this descriptive analysis reveals that the Ebola outbreak, as a non-traditional issue, is a catalyst for a more formal and institutionalized security cooperation amongst ASEAN countries.*

*Keywords: non-traditional security, Ebola epidemic, regional cooperation, ASEAN, security threat*



Kata Kunci bersumber dari artikel  
Lembar ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya

Juli Panglima Saragih

Politik Desentralisasi Fiskal: Permasalahan dalam Implementasi

Desentralisasi fiskal merupakan kebijakan fiskal yang bertujuan menyeimbangkan kapasitas fiskal antara pusat-daerah dan antar-fiskal daerah. Secara konsep, desentralisasi fiskal merupakan sebuah model yang tepat dari politik desentralisasi fiskal. Jenis penelitian ini analisis deskriptif dengan menggunakan sumber data sekunder dari berbagai literatur dan bahan pustaka yang relevan dengan topik. Metode penelitiannya mengaplikasikan pendekatan kualitatif tentang politik desentralisasi fiskal, yang bertujuan menganalisa implementasinya dalam kaitan dengan masalah kemampuan anggaran daerah (APBD), khususnya kapasitas pendapatan asli daerah dalam membiayai kebutuhan belanja daerah yang semakin meningkat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan desentralisasi, masih terdapat permasalahan terkait masih lemahnya kapasitas fiskal daerah walau politik desentralisasi fiskal sudah dilaksanakan sejak otonomi daerah diberlakukan.

Kata kunci: desentralisasi fiskal, kebijakan fiskal, kapasitas fiskal, APBD, Kebutuhan fiskal

Juli Panglima Saragih

*Fiscal Decentralization Policy: Problems of the Implementation*

*Fiscal decentralization is a fiscal policy taken by government to balance inequality fiscal capacity between local-central governments, as well as amongst local government. By concept or formula, it is fairly accepted as a good model of fiscal policy. This research applies a qualitative method that aims to analyse its implementation, particularly problems faced by local budgets, namely its low capacity to cover the increase of local development needs. Relevant secondary data is used to analyse the implementation of fiscal decentralization as a fiscal policy in general. This research concludes that as a concept, fiscal decentralization is a good policy of decentralization, in term of politics. However, due to local budget constraints faced by regional governments, its implementation still meets problems, such as less of local revenue capacity that causes deep dependency on national budget transfer. Also, local tax policy cannot significantly help to solve local budget problems until now.*

*Keyword: fiscal decentralization, fiscal policy, fiscal capacity, APBD, local fiscal needs.*